

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Reformasi keuangan negara telah dimulai sejak tahun 2003 ditandai dengan lahirnya Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan pemerintah untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual paling lambat 5 tahun sejak diterbitkannya undang-undang tersebut sesuai dengan yang tersebut pada Pasal 36 Ayat 1(satu) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi:

*“Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”*

Kemudian sebagai pedoman pelaksanaannya diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun sampai dengan batas waktu yang disyaratkan pada UU Nomor 17 Tahun 2003 untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual untuk pemerintah yaitu 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya undang-undang tersebut, sampai dengan tahun 2008 pemerintah belum berhasil menerapkannya. Baru pada tahun 2010 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ini disebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan yang digunakan adalah standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbunyi:

*”Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual.”*

Sedangkan jangka waktu untuk pemerintah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tersebut direvisi yaitu paling lambat lima tahun sejak dikeluarkannya peraturan tersebut yaitu pada tahun 2015 pemerintah wajib menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dan untuk memberikan pedoman/petunjuk kepada pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah. Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 10 disebutkan bahwa:

*“Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.”*

Dalam mengimplementasikan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: komitmen, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur dan sistem informasi.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kesiapan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan SAP Berbasis AkruaI dilihat dari aspek komitmen?
2. Bagaimanakah kesiapan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan SAP Berbasis AkruaI dilihat dari aspek sumber daya manusia?
3. Bagaimanakah kesiapan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan SAP Berbasis AkruaI dilihat dari aspek infrastruktur?
4. Bagaimanakah kesiapan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan SAP Berbasis AkruaI dilihat dari aspek sistem informasi?
5. Bagaimanakah kesiapan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan SAP Berbasis AkruaI dilihat dari keseluruhan aspek komitmen, sumber daya manusia, infrastruktur dan sistem informasi?

### **1.3. Batasan Masalah**

Batasan masalah penyusunan penelitian ini adalah :

1. Penelitian dilakukan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penelitian dilakukan pada 40 Satuan Kerja dan Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Penelitian dilakukan pada pelaksana akuntansi pada masing-masing SKPD di Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Penelitian dilakukan untuk Pelaporan Keuangan Tahun Anggaran 2015.
5. Kesiapan dilihat dari aspek komitmen, sumber daya manusia, infrastruktur, sistem informasi dan secara keseluruhan yang diambil dari penelitian sebelumnya oleh Ririz Setiawati Kusuma (2013).

### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui kesiapan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan SAP Berbasis AkruaI dilihat dari aspek komitmen;
2. Mengetahui kesiapan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan SAP Berbasis AkruaI dilihat dari aspek sumber daya manusia;
3. Mengetahui kesiapan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan SAP Berbasis AkruaI dilihat dari aspek infrastruktur;

4. Mengetahui kesiapan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan SAP Berbasis AkruaI dilihat dari aspek sistem informasi;
5. Mengetahui kesiapan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan SAP Berbasis AkruaI dilihat dari keseluruhan aspek komitmen, sumber daya manusia, infrastruktur dan sistem informasi.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti  
Menambah pengetahuan tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI pada pemerintah daerah dan menerapkan ilmu Akuntansi Sektor Publik.
2. Bagi Akademisi  
Sebagai salah satu bahan acuan dalam membuat penelitian mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SAP Berbasis AkruaI.
3. Bagi Pemerintah  
Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai evaluasi terhadap pengimplementasian SAP Berbasis AkruaI dan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk membuat langkah strategis dalam menerapkan SAP Berbasis AkruaI.

## 1.6. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan. Untuk memberikan gambaran tentang penulisan skripsi, berikut ini disajikan gambaran umum dari setiap bab.

**BAB I : Pendahuluan**

Merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjelaskan mengenai beberapa konsep dasar sebagai landasan teori dan tinjauan kepustakaan yang diperlukan sehubungan dengan pembahasan masalah.

**BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

**BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Merupakan bab yang menguraikan tentang analisis kesiapan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menerapkan SAP Berbasis Akrua

**BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Merupakan bab yang berisi kesimpulan atas hasil penelitian dan saran-saran kepada Pemerintah Kota Yogyakarta atas hasil penelitian yang dilakukan.